

## Analisis Dan Evaluasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2025

### Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN	ANALISIS DAMPAK	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI	ANALISIS DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG SETINGKAT	ANALISA DENGAN PUTUSAN PENGADILAN	KET.
<p>Penghapusan Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p>	-	<p>Materi muatan/substansi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pancasila;</li> <li>2. UUD 1945;</li> <li>3. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara;</li> <li>4. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</li> <li>5. Perpres Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	<p>Materi muatan dalam Permenhub Nomor PM 10 Tahun 2025 telah mengacu dan memperhatikan pada beberapa Peraturan Menteri lainnya antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permenhub Nomor PM 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;</li> <li>2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia; dan</li> <li>3. Permenhub Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.</li> </ol>	-	<p>Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia telah selesai diharmonisasi berdasarkan surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum Nomor PPE.PP. 01.05-2580 tanggal 17 Juli 2025.</p>



Sekretaris Jenderal,

  
 Dr. Capt. Antoni Arif Priadi, M.Sc.  
 NIP. 19730808 199903 1 003